

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsesus ketimbang melalui konsesus ketimbang penindasan atau kekerasan terhadap Masyarakat (Patria & Arief, 2003 : 120). Pembagian kelompok sosial dalam masyarakat menyebabkan munculnya dominasi yang dilakukan oleh kelompok yang lebih tinggi terhadap kelompok yang lebih rendah. Dominasi ini memunculkan praktik hegemoni kekuasaan (Patria & Arief, 2015:117).

Negara memiliki kekuasaan yang besar, tetapi kekuasaan tidaklah absolut seperti yang digagas oleh Hobbes, melainkan ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia, yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk (Patria & Arief, 2015:117). Kekuasaan merupakan tema yang tidak pernah habis untuk dibahas, terutama dalam konteks politik. Politisi menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Strategi tersebut dapat berupa penguatan akomodasi politik, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui aktivitas seperti blusukan, hingga meminta restu kepada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh besar. Dalam konteks politik Indonesia, pendekatan kepada tokoh berpengaruh, terutama yang dianggap memiliki tuah atau kekuatan magis, sering menjadi salah satu cara utama yang dilakukan oleh para politisi.

Politik sebagai fenomena sosial, kerap kali memperlihatkan strategi-strategi yang digunakan oleh para aktor politik untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks politik Indonesia, fenomena ini tak hanya melibatkan taktik-taktik modern seperti kampanye, blusukan, atau akomodasi politik, tetapi juga menyentuh ranah yang lebih mistis dan simbolik. Salah satu strategi yang paling menonjol adalah mendekati figur-figur yang dianggap memiliki pengaruh besar, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Menurut Maran (2001: 18), politik adalah bidang kajian khusus yang membahas berbagai cara manusia menyelesaikan permasalahan bersama dengan sesama manusia tentang perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk memecahkan permasalahan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia dan ide yang dapat mempengaruhi manusia untuk menyelesaikan masalah. Menurut Surbakti (2010: 2), terdapat lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik merupakan upaya warga negara untuk membahas dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik mencakup segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kelima, politik adalah konflik yang terjadi dalam upaya memperoleh atau mempertahankan sumber daya yang dianggap penting.

Tokoh berpengaruh dalam konteks ini tidak selalu identik dengan individu yang memiliki kekayaan materi seperti pengusaha, miliarder, atau juragan. Meskipun tokoh-tokoh dengan kekuatan ekonomi tersebut tetap menjadi sasaran bagi politisi dalam upaya penggalangan dana dan dukungan, tokoh yang dianggap

memiliki kekuatan spiritual atau magis lebih sering menjadi fokus perhatian, terutama menjelang tahun politik. Tokoh seperti kyai, pemuka agama, atau pemimpin spiritual lainnya sering kali dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan jalan menuju kemenangan melalui "tuah" yang mereka miliki. Fenomena ini mencerminkan bagaimana mistifikasi dan spiritualitas berperan dalam dinamika kekuasaan di Indonesia.

Novel *Tangan Kotor di Balik Layar* (selanjutnya ditulis, *TKdBL*) karya Puthut EA mengeksplorasi isu ini melalui kisah jurnalis muda bernama Hammam yang ditugaskan meliput sebuah padepokan misterius. Padepokan tersebut dimiliki oleh tokoh bernama Mas Ikhsan, yang dikenal sebagai sosok dengan pengaruh besar terhadap para politisi. Dalam novel ini, politisi berlomba-lomba mendatangi Mas Ikhsan, terutama pada masa perebutan kekuasaan di tahun politik. Mereka percaya bahwa Mas Ikhsan memiliki sesuatu yang dapat membantu mereka meraih kekuasaan. Sosok seperti Mas Ikhsan menjadi representasi dari tokoh yang memiliki lapisan kekuasaan tak terlihat, yang beroperasi di balik layar politik.

Salah satu karakter dalam novel, Mbah Carik, adalah seorang politisi kawakan yang kerap sowan ke Mas Ikhsan demi memperlancar ambisinya. Fenomena ini bukanlah fiksi semata, melainkan refleksi dari realitas politik Indonesia. Sepanjang sejarah, terutama dalam pemilihan presiden, politisi sering kali mendatangi tokoh-tokoh spiritual seperti kyai untuk meminta dukungan dan restu. Hal ini menunjukkan bagaimana dimensi mistis dan spiritual tetap menjadi elemen penting dalam strategi politik modern di Indonesia.

Fenomena mistifikasi kekuasaan ini memiliki dua dimensi utama. Pertama, politisi cenderung mendompleng mistifikasi dari seseorang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Mereka percaya bahwa dengan mendekati sosok tersebut, mereka dapat tertular aura magis yang kemudian membantu mereka memenangkan kontestasi politik. Kedua, politisi juga memproduksi mistifikasi terhadap dirinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan narasi tentang sisi magis atau keistimewaan tertentu yang dimiliki politisi tersebut, sehingga menciptakan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa mereka adalah sosok yang layak menjadi pemimpin.

Produksi mistifikasi ini tidak hanya terjadi dalam konteks modern, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat dalam tradisi kekuasaan di Indonesia. Dalam kisah raja-raja Jawa, misalnya, kekuasaan sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang diperoleh melalui peristiwa mistis atau bantuan dari kekuatan supranatural. Pada masa Orde Baru, mistifikasi kekuasaan Suharto diproduksi melalui mitos-mitos tentang kesaktiannya, yang menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade. Fenomena ini menunjukkan bahwa mistifikasi merupakan alat yang efektif dalam membangun legitimasi kekuasaan (Barokah, 2023).

Novel *TKdBL* mengungkapkan lapisan-lapisan kekuasaan yang sering kali tidak terlihat oleh publik. Media massa sering kali hanya menampilkan permukaan dari proses politik, sementara di balik layar terdapat aktor-aktor dan mekanisme yang lebih kompleks. Novel ini menggambarkan bahwa keberhasilan politisi dalam meraih kekuasaan tidak hanya bergantung pada kampanye atau strategi politik yang terlihat, tetapi juga pada peran tangan-tangan yang bekerja di

belakang layar. Puthut EA melalui novelnya seolah ingin menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah menjadi sesuatu yang sederhana; selalu ada lapisan-lapisan tersembunyi yang memengaruhi jalannya politik.

Dalam konteks penelitian, novel ini menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan representasi yang kuat tentang bagaimana hegemoni kekuasaan bekerja dalam realitas sosial dan politik. Konsep hegemoni, seperti yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, mengacu pada dominasi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Dalam hal ini, novel *TKdBL* menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan dijalankan melalui mistifikasi dan spiritualitas yang menjadi alat legitimasi bagi para politisi. Tokoh-tokoh seperti Mas Ikhsan dan Mbah Carik merepresentasikan dua sisi dari hegemoni tersebut: yang satu sebagai produsen mistifikasi, dan yang lain sebagai konsumen mistifikasi.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis bagaimana hegemoni kekuasaan direpresentasikan dalam novel *TKdBL*. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana novel ini mencerminkan realitas sosial-politik di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena mistifikasi kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini akan meninjau berbagai literatur yang relevan, termasuk teori hegemoni Gramsci, konsep mistifikasi dalam tradisi politik Jawa, dan analisis terhadap budaya politik Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana novel ini merepresentasikan hegemoni kekuasaan, serta bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan realitas politik di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam kajian sastra dan politik, khususnya dalam

memahami hubungan antara karya sastra dan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan di Indonesia, serta peran karya sastra dalam merefleksikan dan mengkritisi realitas tersebut.

Secara keseluruhan, novel *TKdBL* karya Puthut EA menawarkan wawasan yang kaya tentang dinamika kekuasaan di Indonesia. Melalui kisah Hammam dan Mas Ikhsan, novel ini menggambarkan bagaimana mistifikasi dan spiritualitas menjadi bagian integral dari proses politik. Dalam konteks penelitian ini, novel tersebut menjadi bahan yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana hegemoni kekuasaan bekerja dalam konteks budaya dan politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas kekuasaan, serta membuka ruang diskusi tentang peran mistifikasi dalam membangun legitimasi politik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti novel *TKdBL* karya Puthut EA dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Dalam novel ini, terdapat gambaran permasalahan yang sesuai dengan konsep teori Gramsci, terutama dalam hal penguasaan secara hegemonik dan dominasi yang disertai persetujuan oleh tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks hegemoni.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas. Masalah dalam penelitian ini adalah praktik hegemoni yang terdapat dalam novel *TKdBL*.

Bagaimana bentuk hegemoni kekuasaan yang digambarkan dalam novel *TKdBL* karya Puthut EA?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirincikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk hegemoni kekuasaan yang digambarkan dalam novel *TKdBL* karya Puthut EA berdasarkan kajian hegemoni gramsci.

1.4 Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini dapat memperkaya kajian sastra, khususnya dalam memahami teori hegemoni Antonio Gramsci yang diterapkan pada karya sastra.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi sastra dengan menggali hubungan antara ideologi, hegemoni, dan karya sastra.
3. Membantu pembaca akademik dalam memahami bagaimana ideologi dan kekuasaan bekerja melalui struktur naratif dalam novel.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca umum, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tema ideologi dan hegemoni yang terdapat dalam novel *TKdBL*, sehingga dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra.

2. Bagi penulis atau pengarang, penelitian ini dapat menjadi refleksi tentang bagaimana sastra dapat digunakan sebagai medium untuk menyuarakan kritik sosial dan ideologi dominan.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk studi lanjutan terkait hegemoni, ideologi, atau kajian sosiologi sastra dalam karya-karya sastra Indonesia lainnya.
4. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai bagaimana hegemoni ideologi bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam karya sastra.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan, beberapa artikel di media massa online membahas novel *TKdBL*, terutama dalam bentuk resensi yang mengulas tema, karakter, dan alur cerita. Namun, sejauh ini belum ditemukan penelitian ilmiah yang secara khusus menganalisis novel *TKdBL* menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji novel *TKdBL* melalui pendekatan teori sosiologi sastra. Selain itu, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi, antara lain:

1. Penelitian oleh Rohmah & Rengganis (2023) dalam artikelnya yang berjudul *Membongkar Praktik Hegemoni dalam Novel Silsilah Duka Karya Dwi Ratih Ramadhany (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)*, *SAPALA*, 10(1), 196–205. Penelitian ini berfokus pada praktik hegemoni yang terdapat dalam novel *Silsilah Duka* karya Dwi Ratih

Ramadhany, menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Melalui pendekatan kualitatif dan metode hermeneutik, penelitian ini berhasil mengidentifikasi enam praktik hegemoni yang mencerminkan dinamika sosial, politik dan kebudayaan dalam masyarakat Madura.

2. Penelitian oleh Hannan & Abdillah (2019), dalam artikelnya yang berjudul *Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial: Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura*, *Sosial Budaya*, 16(1), 9–24. Sosio-kultural masyarakat Madura sangat dipengaruhi oleh elemen agama, ideologi, dan kekuasaan. Pengaruh ini berjalan selaras dengan tradisi lokal yang berpusat pada hierarki sosial dan fanatisme keagamaan yang kuat. Struktur masyarakat yang hierarkis mempermudah dominasi nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Kyai memainkan peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan dinamika sosio-kultural masyarakat Madura.
3. Penelitian oleh Dani & Suseno. (2023) dalam artikelnya yang berjudul *Hegemoni Gramsci dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari*, *Jurnal Sastra Indonesia*, 12(2), 128-145. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hegemoni Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap individu Muslim, Karman, dalam novel *Kubah* mencerminkan bagaimana pengaruh ideologis dapat mengubah pola pikir, religiusitas, dan keputusan seseorang untuk bergabung dengan partai. Terdapat tiga bentuk praktik hegemoni yang teridentifikasi: hegemoni pola pikir, hegemoni religiusitas, dan hegemoni keputusan untuk menjadi

anggota PKI. Dampak dari hegemoni ini termasuk penyesalan, penentangan, dan rasa rendah diri yang dialami oleh Karman setelah terlibat dengan partai tersebut.

4. Penelitian oleh Hatmoko, Sumartini & Mulyono (2014) dalam artikelnya yang berjudul *Hegemoni Moral Nyai Kartareja terhadap Srintil dalam Novel Jantera Bianglala karya Ahmad Tohari: Kajian Hegemoni Gramsci, Jurnal Sastra Indonesia*, 3(1). Penelitian ini mengkaji praktik hegemoni moral yang dilakukan oleh Nyai Kartareja terhadap Srintil dalam novel *Jantera Bianglala* karya Ahmad Tohari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni tersebut didasarkan pada kekuasaan dan dukungan dari kelas atas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik hegemoni adalah dominasi sosial yang dilakukan melalui kepemimpinan intelektual dan moral oleh kelas dominan, bukan dengan cara kekerasan. Paksaan dan penindasan yang dialami kelas bawah, seperti yang dirasakan Srintil, menciptakan dampak yang signifikan. Srintil, sebagai korban, kerap kali tunduk pada perintah kelas dominan seperti Nyai Kartareja, meskipun ia akhirnya mencoba melawan.
5. Penelitian oleh Safitri, Fatimah, dan Budiawan (2024) dalam jurnalnya yang berjudul *Hegemoni dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari, Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 14-32. Mengkaji dominasi kekuasaan yang ada dalam novel tersebut menggunakan pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus

pada analisis bentuk-bentuk hegemoni yang muncul dalam interaksi karakter dan situasi sosial di dalam cerita. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, dengan analisis yang meliputi reduksi data, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menemukan bahwa kekuasaan hegemoni diekspresikan melalui tindakan kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap keluarga Maryam dan warga Gegerung, serta melalui pengaruh Ibu Alam terhadap Maryam.

6. Penelitian oleh Yusuf (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Hegemoni Dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)*, Universitas Negeri Makasar. Penelitian ini menegaskan bahwa novel *Bekisar Merah* tidak hanya menggambarkan realitas sosial masyarakat desa tetapi juga mengilustrasikan bagaimana hegemoni kelas berkuasa memengaruhi kehidupan individu dan kolektif. Melalui narasi yang kaya akan konflik sosial, novel ini menjadi cerminan penting tentang bagaimana dominasi sosial dan budaya dapat berlangsung secara halus namun efektif dalam mempertahankan ketidakadilan struktural.
7. Penelitian oleh Hatta & Ino (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Hegemoni Dalam Novel Tiba Sebelum Berangkat Karya Faisal Oddang*, *Cakrawala Listra: Jurnal Kajian Sastra, Bahasa, dan Budaya Indonesia*, 4(2), 179-200. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk hegemoni yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis

bagaimana pengaruh sosial dan kekuasaan mempengaruhi karakter dan narasi dalam novel. Temuan utama dari penelitian ini mencakup: novel ini menampilkan bagaimana agama, politik dan budaya berperan dalam membentuk perilaku dan norma sosial masyarakat.

8. Penelitian oleh Tami (2017) dalam disertasi yang berjudul *Negosiasi ideologi novel populer Islami komunitas Forum Lingkar Pena: Studi kasus enam novel populer Islami*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa novel populer Islami dari Forum Lingkar Pena (FLP) menjadi alat efektif dalam perjuangan budaya dan ideologi Islam di Indonesia. Novel-novel ini menyampaikan ideologi Islam melalui format romantisisme dan realisme, menampilkan tokoh Muslim yang menghadapi konflik modernitas dan tradisi, serta menawarkan solusi berbasis ajaran Islam. FLP berperan penting secara ideologis dan ekonomi dalam membentuk selera, pasar, dan kesadaran kolektif Muslim, sekaligus menjadikan novel Islami sebagai medium untuk melanjutkan modernisasi Islam dan islamisasi modern.
9. Penelitian oleh Yohanes (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Hegemoni Ideologi dalam Novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo: Kajian Hegemoni Gramsci*, Universitas Andalas. Penelitian ini, mengangkat isu tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Melalui pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menggali bagaimana ideologi dan dominasi sosial tercermin dalam karya sastra tersebut. Cerita ini berpusat pada tokoh Magi Diela, seorang perempuan yang

menolak tradisi kawin tangkap yang dianggapnya merugikan dan tidak sesuai dengan ajaran leluhur. Dalam novel, kawin tangkap digambarkan sebagai praktik yang telah menyimpang dari nilai-nilai asli, di mana prosesnya kini sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pihak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam penerapan tradisi, yang dulunya melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

10. Penelitian oleh Pawestri (2015) dalam skripsinya yang berjudul *Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bibir Merah Karya Achmad Munif*, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan terhadap masyarakat biasa. Fokus penelitian terletak pada formasi ideologi, bentuk hegemoni kekuasaan yang beroperasi dan elemen fiksi yang digunakan untuk merepresentasikan hegemoni kekuasaan dalam 12 novel *Bibir Merah* karya Achmad Munif.

1.6 Landasan Teori

Penelitian yang berfokus pada Novel *TKdBL* karya Puthut EA yang menggunakan teori hegemoni Gramsci, butuh pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur intrinsik fiksi menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum menerapkan teori hegemoni Gramsci. Buku *Teori Pengkajian Fiksi* karya Nurgiyantoro (2012) menawarkan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami unsur-unsur intrinsik tersebut. Nurgiyantoro menjelaskan bahwa sebuah karya fiksi dibangun oleh berbagai unsur intrinsik yang saling berkaitan

erat untuk membentuk kesatuan yang utuh dan indah. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dengan memahami dan menganalisis unsur-unsur intrinsik ini, kita dapat mengungkap bagaimana novel *TKdBL* disusun dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Setelah itu, penerapan teori hegemoni Gramsci dapat dilakukan untuk melihat bagaimana struktur hegemoni kekuasaan tercermin dalam novel tersebut.

1. Hegemoni

Hegemoni, menurut Hendarto, berasal dari istilah Yunani kuno eugemonia, sebagaimana dijelaskan dalam Encyclopedia Britannica. Dalam praktiknya, istilah ini digunakan di Yunani untuk menunjukkan dominasi atau supremasi yang diklaim oleh negara-kota (polis) tertentu, seperti Athena dan Sparta, atas negara-kota lainnya yang setara (Patria & Andi Arief, 2003: 115). Gagasan tentang hegemoni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1885 oleh kaum Marxis Rusia, khususnya Plekhanov pada 1883–1884. Konsep ini dikembangkan sebagai strategi untuk melawan rezim Tsarisme. Istilah hegemoni digunakan untuk merujuk pada kepemimpinan hegemonik yang dibentuk oleh kaum proletar dan perwakilan politik mereka dalam aliansi dengan kelompok lain, termasuk borjuis kritis, petani, dan intelektual, yang semuanya berupaya mengakhiri pemerintahan negara polisi Tsaris (Bocock, 2015: 22).

Lenin berharap bahwa negara akhirnya akan mati, tetapi hal ini tidak terjadi segera sesudah revolusi Rusia. Dia berharap bahwa revolusi akan pecah di Jerman dan di tempat-tempat lain di Eropa

setelah perang dunia pertama berakhir. Kegagalan revolusi Jerman untuk muncul, kebangkitan Nazisme, “Perang Patriotik agung” kedua (Perang Dunia kedua—penerj.), yang diikuti oleh Perang Dingin, : semua peristiwa ini mempertahankan negara yang kuat di Uni Soviet sejak masa Lenin dan Gramsci.”.

Gramsci lebih maju dibandingkan dengan Lenin karena dia membuat strategi untuk diterapkan dalam masyarakat Eropa Barat. Strategi ini didasarkan pada perbedaan yang dia buat antara "perang posisi", yang dapat digunakan di Eropa Barat, dan "perang gerakan", yang dapat terjadi di Rusia pada 1917 dan bergantung pada serangan langsung terhadap negara. Tujuan perang posisi adalah untuk menciptakan hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil sebelum Partai Komunis mengambil alih kekuasaan negara. Perbedaan antara perang manuver dan perang posisi harus dipahami dari sudut pandang konsep-konsep teoretis Gramsci yang lebih luas seperti yang akan dibahas di bawah ini. Harus diingat bahwa Gramsci mengembangkan strategi perang posisi baik sebelum dan selama periode fasis dalam sejarah politik Italia. Jika hal ini tidak diperhatikan, gagasan-gagasannya dapat disalahpahami jika dilepaskan dari konteksnya.

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasikan, baik di masa lalu maupun saat ini,. Kaum borjuis telah menerapkan kepemimpinan secara relatif berhasil di Inggris,

dalam masyarakat sipil, dalam negara, dan dalam perekonomian. Gramsci menjelaskan bahwa di Prancis setelah Revolusi 1789, kaum borjuis juga telah berkuasa secara hegemonik. Sebaliknya, kaum borjuis Italia, yang berbasis di Piedmont, gagal menerapkan hegemoni di Italia dan sebagai akibatnya negara Italia tetap rentan terhadap orang-orang fasis karena negara tersebut tidak berdasarkan kepemimpinan hegemonik oleh kaum borjuis dalam masyarakat sipil atau dalam negara. (Bocock, 2015: 24-25).

Kepemimpinan hegemonik mencakup pembangunan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari berbagai kelompok utama dalam masyarakat. Selain itu, hegemoni juga memiliki dimensi emosional. Para pemimpin politik yang ingin mencapai kepemimpinan hegemonik harus mampu memahami dan menghormati sentimen masyarakat serta tidak tampak terpisah dari massa. Konsep ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan, khususnya dalam hubungan antara filsafat dan teori sosial (Bocock, 2015: 40–41).

2. Hegemoni Antonio Gramsci

Teori hegemoni yang dikemukakan Gramsci merupakan salah satu teori politik paling berpengaruh pada abad ke-20. Gramsci, mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, Gramsci melihat, jika Pangeran akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisir resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pangeran harus menciptakan ketaatan yang spontan dari

yang memerintah. Secara ringkas, Gramsci memformulasikan dalam sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Rantai kemenangan hegemoni dicapai melalui mekanisme persetujuan daripada penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Sistem sosial yang ada mempengaruhi struktur kognitif masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Karena itu, hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk mendorong orang untuk menilai dan melihat masalah sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Dalam konteks ini, Williams mengatakan bahwa Gramsci membangun gagasan tentang situasi sosial politik sebagai "momen", di mana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu: dominasi adalah gagasan dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam lembaga dan manifestasi perseorangan, dan "roh" ini membentuk moralitas, adat istiadat, religi, prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral.

Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator, terutama dari aspek intelektual dan moral. Bellamy menyatakan bahwa hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya, meskipun hegemoni selalu dikaitkan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator. Karena keadaan umum ini diterima oleh buruh, kapitalisme tetap ada. Budaya borjuis menguasai masyarakat, sehingga tidak perlu menggunakan kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga massa

harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi (Patria & Andi Arief, 2003: 120–121).

Konsep bangsa menjadi elemen sentral dalam perjuangan mencapai hegemoni. Gramsci menjelaskan bahwa kepemimpinan suatu bangsa harus melibatkan semua kelas sosial, bukan sekadar kepentingan ekonomi sempit dari penguasa. Ini membutuhkan upaya kreatif untuk membangun konsensus di antara masyarakat, tanpa menghilangkan proses pembentukan identitas individual dalam komunitas tersebut (Bocock, 2015: 38). Gramsci menjabarkan bahwa supremasi kelas penguasa melibatkan dua elemen: dominasi terhadap oposisi dan kepemimpinan terhadap sekutunya. Kepemimpinan harus diterapkan bahkan sebelum kekuasaan politik direbut, dan setelah kekuasaan diraih, kepemimpinan ini tetap harus dipertahankan (Patria & Andi Arief, 2003: 117–118).

Hegemoni terdiri dari ideologi. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang hegemoni, konsep ideologi harus didefinisikan. Pembentukan kesadaran massa adalah fokus dari teori hegemoni ideologi Gramsci. Menurut Gramsci, perkembangan politik dan budaya kelas subaltern dilakukan dengan kesadaran, bukan secara kebetulan. Proporsi perkembangan politik dan kebudayaan kelas menunjukkan peningkatan kesadaran. Bagi Gramsci kekuasaan tidak akan bertahan dengan menggunakan kontrol dan dominasi terhadap massa tetapi dibutuhkan kesepakatan ideologi terhadap massa. Inilah

letak perbedaan ideologi antara Lenin dengan Gramsci. Gramsci pertama-tama menunjukkan bahwa hegemoni merupakan fenomena ideologi, dan kedua hegemoni sebagai fakta politik. Hegemoni sebagai fenomena ideologi, kepemimpinan moral dan intelektual, merupakan kondisi awal untuk mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan negara. Ideologi yang menjadi konsensus menyatukan massa pada saat mereka mempunyai konsepsi tentang dunia yang seragam (Tami, 2017).

Hegemoni bagi Antonio Gramsci memiliki makna yang lebih kompleks dibandingkan sekadar dominasi. Ia memanfaatkannya untuk menganalisis bentuk-bentuk politik, budaya, dan ideologi tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, suatu kelas fundamental dapat mencapai kepemimpinan melalui hegemoni yang melibatkan dimensi moral dan intelektual, bukan hanya lewat paksaan (Faruk, 2015:132).

Dalam kerangka teori Gramsci, terdapat beberapa konsep utama, yaitu kebudayaan, hegemoni, ideologi, kaum intelektual, dan negara.

a) Kebudayaan

Bagi Gramsci sendiri konsep kebudayaan yang lebih tepat, lebih adil, dan lebih demokratis, adalah kebudayaan sebagai organisasi, disiplin batiniah seseorang, yang merupakan pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi, yang dengan sokongannya, seseorang berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di dalam

kehidupan, hak-hak dan kewajibannya. Meskipun demikian, konsep serupa itu tidak dapat muncul secara spontan, melalui serangkaian aksi dan reaksi yang lepas dari kehendak seseorang, seperti yang terjadi pada binatang dan tumbuhan dalam proses alamiah. Yang utama bahwa manusia adalah pikiran, yaitu produk sejarah, bukan alam. Jika tidak, orang tidak dapat menjelaskan fakta, bukti, bahwa selalu ada yang melakukan eksploitasi dan yang dieksploitasi, penciptaan kekayaan dan konsumen sadar-diri, bahwa sosialisme belum terwujud juga (Faruk, 2015 : 139).

b) Hegemoni

Menurut Gramsci, kriteria metodologis yang mendasari penelitian ini didasarkan pada gagasan bahwa supremasi suatu kelompok sosial dimanifestasikan dalam dua cara: sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan moral dan intelektual". Suatu kelompok sosial mengontrol kelompok-kelompok yang bertentangan, yang seringkali "dihancurkan" atau bahkan ditaklukkan dengan militer. Atau, mereka bergabung dengan kelompok yang sama dan memimpinya. Sebelum memperoleh kekuasaan pemerintahan, suatu kelompok sosial dapat, dan bahkan harus, mengambil tindakan. Ia menjalankan kekuasaan dan menjadi dominan; namun, bahkan jika ia sudah melakukannya, ia harus terus memimpin (Faruk, 2015: 141).

c) Ideologi

Gramsci mengatakan bahwa kepercayaan populer dan gagasan serupa adalah kekuatan material juga, mengkritik beberapa rekan sesama marxisnya yang mengabaikan dimensi kesadaran. Dalam hal ini, yang paling penting adalah penyebaran kepercayaan atau gagasan sehingga memengaruhi persepsi seseorang tentang dunia. Bahasa, common sense, dan folklor adalah tiga cara filsafat atau ide tertentu itu menyebar. Folklor mencakup tahyul-tahyul, opini, sistem kepercayaan yang luas, dan cara melihat tindakan tertentu.

Gramsci menganggap common sense sebagai gagasan tentang dunia yang paling umum tetapi tidak sistematis. Meskipun common sense memiliki dasar dalam pengalaman masyarakat, itu tidak mewakili suatu pemahaman yang mendalam tentang dunia, seperti halnya filsafat. Tidak ada agama atau common sense yang dapat mencapai filsafat karena filsafat adalah kumpulan pengetahuan. Lebih jauh lagi, common sense, seperti halnya agama, bersifat kolektif (Faruk, 2015 : 144-146).

d) Kaum Intelektual

Kata “intelektual” di sini harus dipahami tidak dalam pengertian yang biasa, melainkan suatu strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional dalam pengertian yang luas -

entah dalam lapangan produksi, kebudayaan, ataupun dalam administrasi politik. Mereka meliputi kelompok-kelompok, misalnya, dari pegawai yunior dalam ketentaraan sampai dengan pegawai yang lebih tinggi.

Strata itu harus ditempatkan dalam hubungan dengan struktur fundamental masyarakat. Setiap kelompok sosial dalam lapangan ekonomi menciptakan satu atau lebih strata intelektual yang memberinya homogenitas dan suatu kesadaran mengenai fungsinya sendiri tidak hanya dalam lapangan ekonomi, tetapi juga dalam lapangan sosial dan politik. Pengusaha kapitalis menciptakan bersama dirinya teknisi industri, spesialis dalam ekonomi politik, organisator suatu kebudayaan baru, hukum baru, dan sebagainya.

Kelompok intelektual disebut Gramsci sebagai kelompok intelektual “organik”, sedangkan kelompok kedua disebut kelompok intelektual “tradisional”. Kedua kelompok itu terpisah, tetapi secara historis dapat saling bertumpang tindih. Apa yang penting dalam hal ini adalah bahwa sifat hubungan antar kelompok itu akan sangat memengaruhi sifat hegemoni yang ada: apakah ada konflik dan stabilitas antar mereka, ataukah ada pertalian politis dan kultural antara keduanya (Faruk, 2015 : 150-151).

e) Negara

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara: dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik. Yang pertama penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah “kesetujuan”, “kehendak bebas”, sedangkan wilayah yang kedua merupakan dunia kekerasan, pemaksaan, dan intervensi. Meskipun demikian, kedua dunia tersebut termasuk dalam konsep negara dalam pengertian khusus.

Negara bagi Gramsci tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintah, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil. Negara adalah kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga berusaha memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya (Faruk, 2015 : 152-153).

1.7 Metode Dan Teknik Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang dipilih peneliti dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan karakteristik sastra sebagai objek kajian. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017: 4), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap novel *TKdBL* karya Puthut EA. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik politik yang digambarkan dalam novel.

2. Analisis data

Data dianalisis berdasarkan unsur-unsur intrinsik, yaitu tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, konflik, dan tema. Selanjutnya, menganalisis bentuk-bentuk hegemoni Gramsci dalam novel *TKdBL* karya Puthut EA secara mendalam.

3. Penyajian hasil analisis

Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi tertulis. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

1.8 Sistematika kepenulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan teori, metode dan teknik penelitian, sistematika kepenulisan.

BAB II : Unsur instrinsik dalam Novel *TKdBL* karya Puthut EA.

BAB III : Hegemoni kekuasaan dalam Novel *TKdBL* karya Puthut EA.

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

